

KATALOG/CATALOG : 3205005.3276

PROFIL KEMISKINAN

KOTA DEPOK

2022



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK

PROFIL KEMISKINAN KOTA DEPOK 2022

Katalog : 3205005.3276

No. Publikasi : 32760.2305

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman : vii + 40 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Depok

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kota Depok

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kota Depok

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah

Mufti Swaghara

Penanggung jawab :

Mufti Swaghara

Editor :

Hilmiah

Nurine Kristy

Chintya Ovelia Arifin

Pengolah Data :

Hilmiah

Penulis :

Hilmiah

Desain Layout :

Nurine Kristy

Infografis :

Nurine Kristy

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat. BPS berupaya menyajikan data terkait kemiskinan salah satunya melalui publikasi Profil Kemiskinan Kota Depok 2022.

Publikasi Profil Kemiskinan Kota Depok 2022 menyajikan data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator/variabel lain yang terkait dengan isu kemiskinan Kota Depok. Data dan informasi yang tersaji pada publikasi ini merupakan hasil penghitungan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode Maret 2022.

Diharapkan publikasi Profil Kemiskinan Kota Depok 2022 dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian publikasi ini diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Depok, Februari 2023
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK



MUFTI SWAGHARA

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	4
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II METODOLOGI.....	7
2.1 Metode Penghitungan Kemiskinan.....	7
2.2 Indikator Kemiskinan.....	15
BAB III KEMISKINAN KOTA DEPOK.....	19
3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Depok.....	19
3.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2015-2022.....	22
3.3 Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kota Depok.....	28

BAB IV PROFIL KEMISKINAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK...	31
4.1 Pendidikan.....	31
4.2 Ketenagakerjaan.....	33
4.3 Pengeluaran Perkapita.....	36
4.4 Fasilitas Perumahan.....	37
4.5 Program Pemerintah.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40

<https://depokkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Persentase Penduduk Miskin 10 Terendah Kabupaten/Kota Se Indonesia tahun 2022.....	20
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Wilayah dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2022.....	31
Tabel 4.2	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin menurut Wilayah dan Golongan Umur, 2022.....	32
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Wilayah dan Status Bekerja, 2022.....	33
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Wilayah dan Sektor Bekerja, 2022.....	35
Tabel 4.5	Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan menurut Wilayah dan Status Miskin, 2022.....	36
Tabel 4.6	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Wilayah yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama, 2022.....	37
Tabel 4.7	Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Wilayah yang Menerima BPNT/Program Sembako serta Rata-rata Jumlah Beras yang Diterima dan Harga yang Dibayarkan, 2022.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota Se Jawa Barat, 2022.....	19
Gambar 3.2	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Depok, 2004-2022.....	21
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Miskin di Kota Depok, 2015-2022.....	23
Gambar 3.4	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Depok, 2014-2022.....	26
Gambar 3.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Depok, 2004-2022.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Menurut Houghton & Khandker (2009), ada empat alasan mengukur kemiskinan yaitu:

1. Merupakan instrumen yang kuat untuk memfokuskan pembuat kebijakan pada kehidupan orang miskin.
2. Mengidentifikasi orang miskin sehingga dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat.
3. Memantau dan mengevaluasi proyek dan kebijakan yang digunakan untuk orang miskin.
4. Mengevaluasi lembaga yang mempunyai tujuan membantu masyarakat miskin.

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan merupakan salah satu agenda

utama pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pelaksanaan agenda tersebut membutuhkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan (swasta).

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam Inpres No. 4 Tahun 2022 tersebut diinstruksi untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Kemiskinan ekstrem merupakan sebagian kecil dari penduduk miskin. Ketika terjadi penghapusan kemiskinan

ekstrem diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Data kemiskinan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada 1993 informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Selanjutnya, sejak tahun 2002 BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan publikasi ini antara lain untuk:

- a. Mengetahui perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Depok;
- b. Mengetahui profil kemiskinan Kota Depok berdasarkan karakteristiknya tahun 2022.

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan secara regional di Kota Depok tahun 2022. Karakteristik penduduk miskin dan tidak miskin, distribusi dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin dan beberapa indikator kemiskinan lainnya juga disajikan dengan menggunakan data Susenas Modul Konsumsi dan Kor pada Maret 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang metodologi penghitungan kemiskinan.

Bab III menjelaskan tentang kemiskinan di Kota Depok, perkembangan tingkat kemiskinan, perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Bab IV menjelaskan tentang Profil Kemiskinan di Kota Depok berdasarkan karakteristik sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan pada rumah tangga miskin di Kota Depok.

<https://depokkota.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penghitungan Kemiskinan

a. Konsep

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di Kota Depok tahun 2022 adalah data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret 2022.

Penimbang yang digunakan dalam penghitungan kemiskinan kabupaten/ kota tahun 2022 ini menggunakan angka proyeksi penduduk dari data Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015).

c. Metodologi

Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and*

Inequality yang diterbitkan oleh *World Bank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK merupakan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan

diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Penghitungan Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota

Penghitungan kemiskinan pada level kabupaten/kota tidak menggunakan GKM dan GKNM seperti yang dilakukan pada penghitungan kemiskinan di provinsi. Hal ini disebabkan oleh:

- Keterbatasan jumlah sampel untuk populasi referensi di level kabupaten/kota.
- Estimasi di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dibedakan berdasarkan perkotaan dan perdesaan.

Pendekatan dalam menghitung kemiskinan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat Kabupaten/ Kota dengan cara:

$$GKS_{ij}^t = GKS_{ij}^{t-1} x (1 + (E_j \times I_{ij}))$$

Dimana:

GKS_{ij}^t : Garis Kemiskinan Sementara kabupaten/kota ke-*i* di provinsi ke-*j* di tahun *t*

GK_{ij}^{t-1} : Garis kemiskinan kabupaten/kota ke-*i* di provinsi ke-*j* di tahun *t-1*

- E_j : Elastisitas provinsi ke- j (rasio antara pertumbuhan garis kemiskinan provinsi ke- j terhadap inflasi provinsi ke- j)
- I_{ij} : Inflasi kabupaten/kota ke- i di provinsi ke- j

Catatan:

- Untuk mencari GKS pada tingkat kabupaten ke- i digunakan elastisitas provinsi ke- j di level perdesaan.
 - Untuk mencari GKS pada tingkat kota ke- i digunakan elastisitas provinsi ke- j di level perkotaan.
 - Untuk kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, laju inflasinya diperoleh dari kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan *sister city*).
2. Menentukan P_0 sementara kabupaten/kota ke- i di provinsi ke- j yaitu dengan cara mengalikan pertumbuhan P_0 provinsi ke- j periode t ke $t-1$ dengan P_0 kabupaten ke- i pada tahun $t-1$.
 3. Menetapkan Garis Kemiskinan dengan cara menarik titik potong antara GKS dan P_0 sementara.
 4. Menghitung indikator kemiskinan dengan menggunakan formulasi FGT (Foster-Greer-Thorbecke, 1984).

e. Konsep dan Definisi

PENDIDIKAN

Pendidikan yang ditamatkan adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas. Publikasi ini mengelompokkan pendidikan yang ditamatkan menjadi tiga, yaitu SD ke bawah (tidak mempunyai ijazah), mempunyai ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah SMA atau ijazah perguruan tinggi.

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi ini menyajikan angka melek huruf penduduk miskin untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun.

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari penduduk miskin yang masih bersekolah. Publikasi ini menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun diantara penduduk miskin berusia sekolah.

KETENAGAKERJAAN

Bekerja adalah kegiatan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan maksud memperoleh atau membantu

memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu.

Bekerja di kegiatan informal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar.

Bekerja di kegiatan formal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

Bekerja di sektor pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

Bekerja di sektor bukan pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja selain di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya. Tidak bekerja

adalah penduduk miskin yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).

PENGELUARAN PER KAPITA UNTUK MAKANAN

Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dibagi dengan total pengeluaran per kapita (makanan dan non makanan).

FASILITAS PERUMAHAN

Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum terlindung yang meliputi leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk jika air minum utamanya menggunakan air kemasan bermerk atau air isi ulang dan sumber air utama air mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan

air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

PROGRAM PEMERINTAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Salah satu instrumen Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang disiapkan Pemerintah sebagai kebijakan stimulus untuk mengurangi dampak COVID-19 adalah melalui program Sembako, yang merupakan program nasional dan telah diperuntukkan untuk menysasar masyarakat miskin dan rentan. Mulai bulan Maret 2020, Nilai bantuan program Sembako kembali dinaikkan menjadi Rp 200.000/KPM/bulan. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa tanggap darurat. Selain peningkatan nilai bantuan, jumlah penerima manfaat program Sembako pada tahun 2020 juga diperluas dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM.

2.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

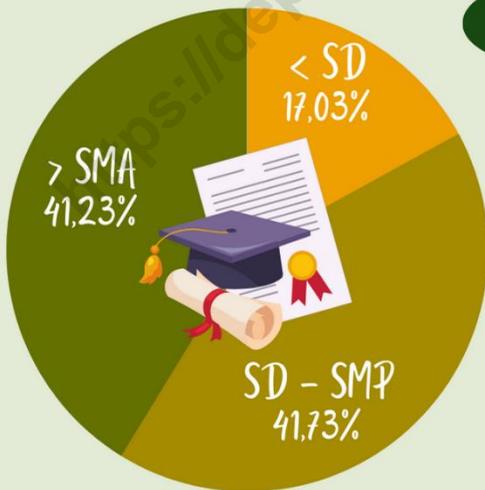
- a. *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

PROFIL KEMISKINAN KOTA DEPOK 2022



Presentase Penduduk
Miskin 2,53 %

Persentase Rumah Tangga Penerima B/PNT 25,69 %
Rata-rata Jumlah Beras yang Dibeli 10 kg/bulan
Rata-rata Harga Beras yang Dibeli Rp 11.279,-/kg



Status Bekerja Penduduk Miskin



Tingkat Pendidikan Penduduk Miskin

Sumber : Susenas Maret 2022

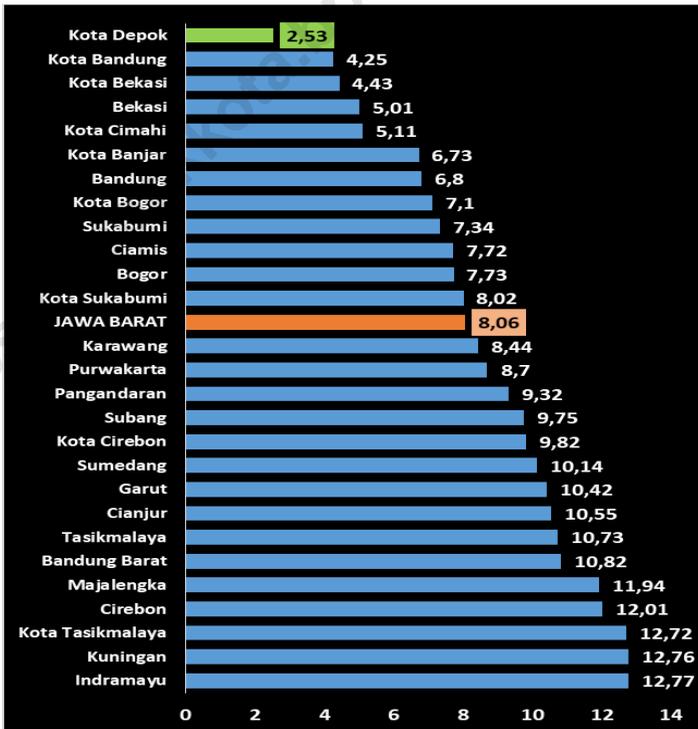
BAB III

KEMISKINAN DI KOTA DEPOK

3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Depok

Persentase penduduk miskin Kota Depok tahun 2022 sebesar 2,53 persen menduduki urutan nomor satu terendah se Jawa Barat.

Gambar 3.1. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota Se Jawa Barat, 2022



Sumber: BPS, Susenas 2022

Persentase penduduk miskin Kota Depok tahun 2022 menduduki ranking ke 5 dari 514 kabupaten/kota se Indonesia.

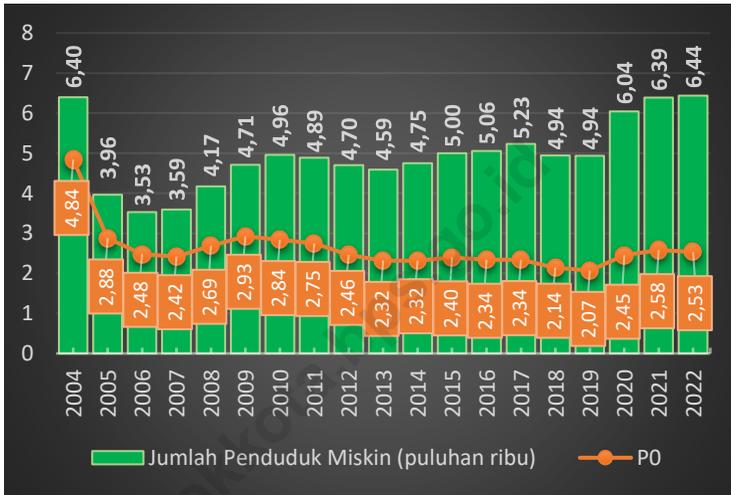
Tabel 3.1. Persentase Penduduk Miskin 10 Terendah Kabupaten/Kota Se Indonesia Tahun 2022

Kabupaten/Kota	P ₀	Ranking
(1)	(2)	(3)
Kota Sawah Lunto	2,28	1
Kota Balikpapan	2,45	2
Bangka Barat	2,46	3
Kota Tangerang Selatan	2,50	4
Kota Depok	2,53	5
Badung	2,53	6
Banjar	2,79	7
Kota Sungai Penuh	2,97	8
Kota Denpasar	2,97	9
Kota Solok	3,02	10

Sumber : BPS, Susenas 2022

Persentase penduduk miskin di Kota Depok periode 2004 sampai 2019 cukup fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan menurun. Sejak tahun 2004, angka kemiskinan secara konsisten sudah melandai dari 4,84 persen di tahun 2004 menjadi 2,07 persen di tahun 2019.

Gambar 3.2 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Depok, 2004-2022



Sumber: BPS, Susenas 2004 – 2022

Merebaknya pandemi Covid-19, berdampak meningkatnya kemiskinan Kota Depok. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Kota Depok meningkat dikisaran 2,45 persen dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 2,58 persen.

Kemiskinan tahun 2020-2021 yang diakibatkan dampak covid-19 merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Kota Depok. Angka kemiskinan Kota Depok yang sudah turun hingga 2,07

persen terendah sejak 15 tahun (2004 - 2019), di awal Pandemi Covid-19 naik sebesar 0,38 persen menjadi 2,45 persen di tahun 2020 dan kembali naik di tahun 2021 sebesar 0,13 persen menjadi 2,58 persen. Angka ini hampir menyamai angka kemiskinan Kota Depok kondisi 14 tahun lalu (tahun 2007).

Seiring dengan upaya pemerintah dalam pemberian vaksin 1 dan vaksin 2 serta Booster covid-19 yang diberikan secara gratis kepada masyarakat berdampak pandemi covid-19 mulai mereda. Roda perekonomian dan kehidupan masyarakat berangsur berjalan normal. Angka kemiskinan Depok mengalami penurunan menjadi 2,53 persen di tahun 2022.

3.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2015-2022

Berbagai pembatasan kegiatan akibat penyebaran Covid-19 berdampak pada berbagai sektor usaha di Kota Depok. Kota Depok yang selama ini mengandalkan sektor industri, konstruksi dan perdagangan, merasakan dampak yang cukup besar dari pandemi Covid-19.

Secara umum, persentase penduduk miskin di Kota Depok jauh lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan provinsi Jawa Barat dan nasional. Angka kemiskinan

nasional baru mencapai *single digit* pada tahun 2018, sedangkan Kota Depok sudah mencapainya sejak pertama kali dihitung tahun 2004. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Miskin di Kota Depok, 2015 - 2022



Sumber : Susenas 2015 - 2022

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Depok relatif lebih stagnan jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan nasional yaitu di kisaran 2 persen. Kajian lebih mendalam terkait profil dan karakteristik penduduk

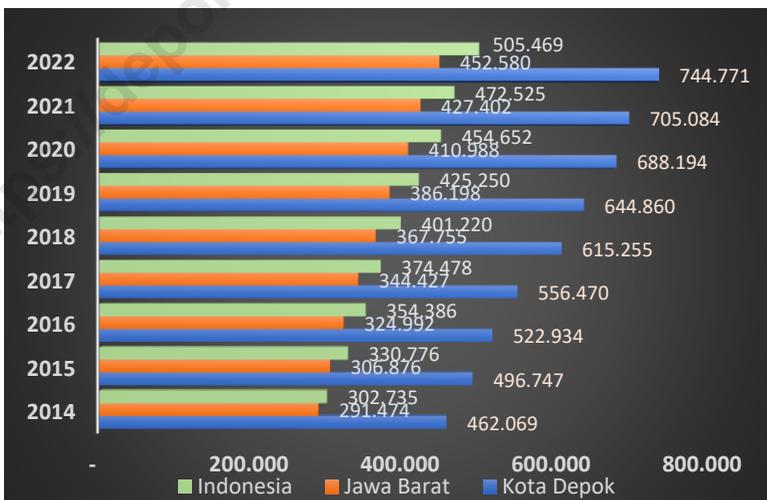
miskin di Kota Depok serta faktor apa saja yang diduga menjadi penyebabnya akan menjadi menarik untuk dilakukan.

Persentase penduduk miskin di Kota Depok pada 2021 mencapai 2,58 persen atau sebesar 63,86 ribu orang. Dibandingkan dengan tahun 2020 (2,45 persen atau 60,43 ribu orang), persentase penduduk miskin naik 0,13 persen poin atau bertambah 3,43 ribu orang. Sementara itu persentase penduduk miskin pada tahun 2022 (2,53 persen atau sebesar 64,36 ribu orang) jika dibandingkan dengan 2021, persentase penduduk miskin turun sebesar 0,05 persen poin atau bertambah 0,50 ribu orang.

Pola yang sama juga terjadi di Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada periode 2020 ke 2021 (Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat naik sebesar 0,52 persen poin atau 275,11 ribu orang dan nasional naik sebesar 0,36 persen poin atau 1,12 juta orang). Kenaikan angka kemiskinan di tahun 2021 ke 2022 tidak sebesar tahun 2020 ke 2021. Pada periode 2021 ke 2022 (Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat turun sebesar 0,34 persen poin atau 124,36 ribu orang dan nasional turun sebesar 0,60 persen poin atau 1,38 juta orang).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Gambar 3.4 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Depok, 2014-2022



Sumber : BPS, Susenas 2014-2022

Garis Kemiskinan (GK) Kota Depok selama periode 2014 – 2022 berada di atas GK Provinsi Jawa Barat dan nasional, sementara GK Provinsi Jawa Barat berada di bawah GK nasional. Hal ini menunjukkan kesejahteraan penduduk Kota Depok lebih baik dibandingkan Jawa Barat dan nasional, namun kesejahteraan penduduk Provinsi Jawa Barat tidak lebih baik dibandingkan nasional.

Selama tahun 2014-2022, Garis Kemiskinan (GK) bertambah sejalan dengan inflasi dan kondisi ekonomi. Pada periode 2020 ke 2021, GK Kota Depok naik 2,45 persen dari Rp 688.194 per kapita per bulan menjadi Rp 705.084 per kapita per bulan. Sementara itu pada periode 2021 ke 2022, GK Kota Depok naik sebesar 5,63 persen dari Rp 705.084 per kapita per bulan menjadi Rp 744.771 perkapita per bulan.

GK Provinsi Jawa Barat dan nasional juga menunjukkan pola yang sama, pada periode 2020 ke 2021 dan 2021 ke 2022. Pada periode 2020 ke 2021, GK Provinsi Jawa Barat naik 3,99 persen dari Rp 410.988 per kapita per bulan menjadi Rp 427.402 per kapita per bulan. Sementara itu pada periode 2021 ke 2022, GK Provinsi Jawa Barat naik sebesar 5,89 persen dari Rp 427.402 per kapita per bulan menjadi Rp 452.580 perkapita per bulan.

Pada periode 2020 ke 2021, GK nasional naik 3,93 persen dari Rp 454.652 per kapita per bulan menjadi Rp 472.525 per kapita per bulan. Sementara itu pada periode 2021 ke 2022, GK nasional naik sebesar 6,97persen dari Rp 472.525 per kapita per bulan menjadi Rp 505.469 perkapita per bulan.

3.3. Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan di Kota

Depok

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kebijakan kemiskinan tidak saja menurunkan angka kemiskinan, namun seharusnya juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Kearifan Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Kearifan Kemiskinan (*Poverty Severity*

Index-P₂) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 3.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) di Kota Depok, 2004-2022



Sumber : BPS, Susenas 2004-2022

Pada periode 2004-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) Kota Depok bisa dikatakan fluktuatif. P₁ turun agak tajam pada periode 2004 -2007 namun kembali naik dan turun lagi pada tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 2015 kenaikan dan penurunan P₁ mulai lebih stabil. Sementara

itu untuk P_2 kenaikan dan penurunan cenderung lebih stabil dibandingkan P_1 . Perubahan P_2 cenderung lebih stagnan.

Kondisi Pandemi Covid-19 salah satunya juga memperparah angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Depok. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Depok naik sebesar 0,05 poin dari 0,29 pada 2020 menjadi 0,34 pada 2021. Di tahun 2022 pun P_1 kembali naik sebesar 0,08 poin dari 0,34 menjadi 0,42.

Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Depok juga mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin dari 0,06 pada 2020 menjadi 0,07 pada 2021. Di tahun 2022 pun P_2 kembali naik sebesar 0,03 poin dari 0,07 menjadi 0,10.

BAB IV

PROFIL KEMISKINAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK

4.1. Pendidikan

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Wilayah dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2022

Wilayah	< SD	Tamat SD/SMP	>SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Depok	17,03	41,73	41,23
Jawa Barat	15,20	63,72	21,09

Sumber : Susenas 2022

Pada Tabel 4.1. menunjukkan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Depok di dominasi mereka yang tamatan SD/SMP yaitu sebesar 41,73 persen dan tamatan SMA ke atas sebesar 41,23 persen. Sisanya sebesar 17,03 persen penduduk miskin adalah tidak tamat SD termasuk yang tidak pernah sekolah. Untuk Provinsi Jawa Barat persentase terbesar penduduk miskin usia 15 tahun keatas juga merupakan tamatan SD/SMP sebesar 63,72 persen.

Tabel 4.2. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin menurut Wilayah dan Golongan Umur, 2022

Wilayah	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
	15-24	15-55	7-12	13-15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Depok	100,00	100,00	100,00	100,00
Jawa Barat	100,00	99,15	98,80	87,47

Sumber : Susenas 2022

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk miskin Kota Depok tahun 2022 sudah mencapai 100 persen, baik untuk usia 15 – 24 tahun maupun 15 – 55 tahun. Sementara itu di Provinsi Jawa Barat AMH penduduk miskin usia 15 – 55 tahun masih sebesar 99,15 persen. Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk miskin usia 7-12 tahun di Kota Depok tahun 2022 sudah mencapai 100 persen, lebih tinggi dari APS Provinsi Jawa Barat sebesar 98,80 persen. APS penduduk miskin usia 13-15 tahun di Kota Depok tahun 2022 sebesar 100,00 persen, lebih tinggi dari APS Provinsi Jawa Barat sebesar 87,47 persen. Namun demikian kondisi

ini tetap menjadi perhatian karena kemiskinan dapat mengakibatkan mudahnya anak putus sekolah dikarenakan kemiskinan keluarganya.

4.2. Ketenagakerjaan

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Wilayah dan Status Bekerja, 2022

Wilayah	Tidak bekerja	Bekerja	
		Kegiatan Informal	Kegiatan Formal
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Depok	53,74	20,78	25,48
Jawa Barat	50,47	28,19	21,34

Sumber : Susenas 2022

Pada umumnya kepala rumah tangga miskin berstatus sebagai pekerja Informal. Menurut sektornya, pekerja dibagi menjadi dua yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja informal adalah pekerja yang mempunyai status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak

tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian serta pekerja keluarga tidak dibayar.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jika dilihat dari status bekerja, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Depok tahun 2022 lebih dari separuh (53,74 %) tidak bekerja, sisanya 46,26 persen bekerja baik sebagai pekerja informal maupun pekerja formal.

Sumber penghasilan utama menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sumber penghasilan utama rumah tangga dan status pekerjaan.

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Wilayah dan Sektor Bekerja, 2022

Wilayah	Tidak bekerja	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan Di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Depok	53,74	1,47	44,79
Jawa Barat	50,47	15,82	33,71

Sumber : Susenas 2022

Secara umum, rumah tangga miskin yang bekerja di Kota Depok tahun 2022 bekerja pada bukan sektor pertanian yaitu sebesar 44,79 persen (Tabel 4.4). Adapun untuk Provinsi Jawa Barat, penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian masih cukup besar (15,82 %).

4.3. Pengeluaran Perkapita

Tabel 4.5. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan menurut Wilayah dan Status Miskin, 2022

Wilayah	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Depok	58,61	41,44	41,52
Jawa Barat	65,48	48,92	49,28

Sumber : Susenas 2022

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa persentase pengeluaran per kapita untuk makanan penduduk miskin di Kota Depok tahun 2022 mencapai 58,61 persen. Berbeda dengan penduduk tidak miskin yang persentase pengeluaran perkapita untuk makanannya hanya 41,44 persen. Dilihat pola untuk tingkat Provinsi Jawa Barat, persentase pengeluaran perkapita untuk makanan pada penduduk miskin mencapai 65,48 persen dan untuk penduduk tidak miskin persentase pengeluaran perkapita untuk makanan sebesar 48,92 persen.

4.4. Fasilitas Perumahan

Tabel 4.6. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Wilayah yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/ Bersama, 2022

Wilayah	Air Layak	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)
Kota Depok	100,00	100,00
Jawa Barat	88,29	82,94

Sumber : Susenas 2022

Air layak adalah air yang bersumber dari leding, air hujan, air pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja 10 meter ke atas. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa penggunaan air layak dan jamban sendiri/ bersama di Kota Depok. Seluruh (100,00 persen) rumah tangga miskin di Kota Depok sudah menggunakan air layak.

Persentase rumah tangga miskin di Jawa Barat yang menggunakan air layak sebesar 88,29 persen.

4.5. Program Pemerintah

Tabel 4.7. Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Wilayah yang Menerima BPNT/Program Sembako serta Rata-rata Jumlah Beras yang Diterima dan Harga yang Dibayarkan, 2022

Wilayah	Persentase Ruta Miskin Penerima BPNT/Program Sembako (%)	Jumlah (kg/bulan)	Harga (Kg)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Depok	25,69	10,0	11.279
Jawa Barat	33,19	18,11	10.831

Sumber : Susenas 2022

Berbagai program diluncurkan pemerintah dalam upaya membantu masyarakat miskin dan kurang mampu diantaranya Program Indonesia Pintar (PIP), BPSJS Kesehatan, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non tunai/bantuan sembako. Salah satu bantuan pemerintah dalam upaya memberikan keringanan

konsumsi rumah tangga miskin adalah pemberian bantuan pangan non tunai (BPNT)/program sembako.

Rumah Tangga Miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah rumah tangga miskin yang menerima bantuan sosial pangan BPNT yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warong yang bekerja sama dengan Bank Penyalur. Bahan pangan dalam program BPNT ini adalah beras dan/atau telur.

Ada sekitar 12,91 persen rumah tangga menerima Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako) dari total rumah tangga yang ada di Depok. Tabel 4.8 menunjukkan persentase rumah tangga miskin yang menerima dan memanfaatkan bantuan pangan non tunai (BPNT)/program sembako yang dibeli dalam bentuk sembako selama 4 bulan terakhir (Nopember 2021 – Pebruari 2022) sebesar 25,69 persen. Rata-rata beras yang dibeli sebanyak 10 kg dengan rata-rata harga Rp 11.279.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2022. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2022. BPS: Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2022.

Badan Pusat Statistik. 2022. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2022. BPS: Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2022.

Badan Pusat Statistik. 2022. Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022 No. 51/07/Th.XXV, 15 Juli 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2022. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2022.

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK**

Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota
Depok

Telp./Fax. (021)7710370/(021)77825913

Website : depokkota.bps.go.id , E-mail : bps3276@bps.go.id